

**JENIS DAN POLA PENYELESAIAN  
PELANGGARAN KEIMIGRASIAN  
DI TIMOR LESTE**

**Tesis**

**Diajukan kepada  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Oleh:**

**Fortunato Fausto Guterres**

**NPM: 322011902**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
2013**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT DAN PERSETUJUAN AKSES

Sebagai sivitas akademik Universitas Kristen Satya Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fortunato Fausto Guterres

NIM : 322011902

Email : guterres\_fausto@yahoo.com

Fakultas : Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul tugas akhir : Jenis dan Pola Penyelesaian Pelanggaran Keimigrasian di Timor Leste

Dengan ini menyerahkan karya tersebut di atas untuk disimpan dalam Koleksi Digital Perpustakaan Universitas dengan ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Koleksi Digital Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA.
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Koleksi Digital Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA. \*

\* poin b harus dilampiri dengan surat dari Dekan/ Kaprodi atau pembimbing TA dengan diketahui oleh pimpinan fakultas yang menjelaskan alasan pilihan. Yang akan ditampilkan adalah halaman judul + abstrak.

Dengan ini saya juga menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/ terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Saya menyerahkan hak non-eksklusif kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik di atas dan norma hukum yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, September 2013


Dr. Tri Budiyono, SH., M. Hum

Mengetahui,

Fortunato Fausto Guterres

Umbu Rauta, SH., M. Hum

## *MOTTO*



*"Nothing is  
easy but  
everything is  
possible"*

*"You can finishing your university,  
but education and learning process is  
still continue until the last day of your  
life".*

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **JENIS DAN POLA PENYE-  
LESAIAN PELANGGARAN  
KEIMIGRASIAN DI TIMOR  
LESTE**

Nama Mahasiswa : **Fortunato Fausto Guterres**

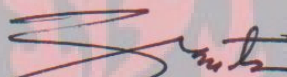
NPM : **322011902**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Tri Budiyono, SH., M.Hum.**

  
**Umbu rauta, SH., M.Hum**

Mengesahkan  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Tri Budiyono, SH., M.Hum**

Dinyatakan Lulus Ujian tanggal: **25 Juli 2013**

## ABRTRAKSI

Secara konstitusional Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menjamin adanya perlindungan kepada setiap warga negara, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RDTL (*Constituição da RDTL*). Namun, jika dilihat dari segi wilayah, Timor Leste sangat rentan terjadi kejahatan keimigrasian karena wila-yahnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia, lemahnya sarana prasarana, terbatasnya jumlah personel keimigrasian dan sifat permisif pemerintah terhadap warga asing yang akan masuk Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana jenis dan pola penyelesaian pelanggaran keimigrasian di Timor Leste. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan sosiolegal. Timor Leste sebagai negara hukum tentu mempunyai kedaulatan negara dengan adanya hukum yang mengatur untuk menjaga kedaulatan tersebut. Dalam kaitannya dengan keimigrasian, Timor Leste mempunyai Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian yang menjadi sumber hukum pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran keimigrasian. Selain itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem hukum, Lawrence M Friedman mengemukakan teori *legal system* yang terdiri dari materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya pintu-pintu imigrasi yang tersebar dalam 12 distrik dan 1 daerah otonom, 74 personel keimigrasian, struktur keimigrasian Timor Leste dan jenis pelanggaran yang sering terjadi. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi antara lain *illegal crossing*, *illegal stay*, penyalahgunaan visa dan pemalsuan visa. Terjadinya berbagai pelanggaran tersebut karena adanya beberapa kelemahan dari pemerintah Timor Leste dan peraturan setempat. Dalam segi budaya hukum, aparat penegak hukum, penduduk dan pemerintah Timor Leste masih kurang peduli dengan penerapan hukum untuk kasus keimigrasian sehingga berdampak pada meningkatnya dan terulangnya pelanggaran yang sama. Dari segi

substansi hukum, undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dengan budaya hukum setempat. Jika ditinjau dari struktur hukum, pemerintah Timor Leste memiliki kelemahan dalam kualitas sumber daya manusia dan kuantitas dalam hal penegakan hukum serta struktur organisasi yang rumit sehingga tidak efektif dan efisien dalam pencegahan dan penanganan suatu kasus keimigrasian.

Key words: keimigrasian, Timor Leste, pelanggaran.





## ABSTRACT

Democratic Republic of Timor-Leste has constitution to ensure the protection of every citizen, it is stated in the Preamble to the Constitution of Timor-Leste. However, when viewed in terms of territory, Timor-Leste is vulnerable to immigration crime because of the area directly adjacent to Indonesia, weak infrastructure, limited number of personnel and permissive behavior of the government on foreigners who would come to Timor Leste. Therefore, in this study will be discussed regarding the types and patterns of settlement about immigration violations in Timor Leste. To answer these problems, researchers used non-doctrinal research with sosiolegal approach. Timor-Leste as a country that have sovereignty which is regulated by law. In relation to immigration, Timor Leste has Law No. 9 of 2003 on Immigration as the source of implementation and completion of immigration violations. In addition, in relation to the implementation of the legal system, Lawrence M Friedman put forward the theory of legal system consisting of legal materials, legal structure and legal culture.

In these studies, the researcher found that Timor Leste has immigration boards in 12 districts and 1 autonomous region, 74 immigration personnel, Timor Lestes structure of immigration and the immigration offenses that oftenly occur oftenly. The types of violations which are happen in Timor Leste include illegal crossing, illegal stay, misuse of visas and visa fraud. The violations are triggered by some weakness of the government of Timor Leste and local regulations. In terms of legal culture, law enforcement officials, residents and the government of Timor Leste are less concerned with the application of law to immigration cases that result in the increase and the recurrence of similar violations. In terms of legal substance, the applicable law is not in accordance with the development of society that need to be adapted to local legal culture. If the terms of the legal structure, the government of Timor-Leste has a weakness in the quality and quantity of human resources in terms of law enforcement as well as complex

organizational structures that are not effective and efficient in the prevention and handling of an immigration case.

*Key words: Immigration, Timor Leste, a violation.*





## KATA PENGANTAR

Dalam ketertarikan penulis untuk menulis tentang “Jenis dan Pola Penyelesaian pelanggaran Keimigrasian di Timor Leste” berangkat dari pemikiran bahwa Timor Leste merupakan negara yang baru merestorasikan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Hal mana tentu saja menghadapi banyak permasalahan dalam institusi keimigrasian, baik itu dari segi materi hukum, struktur hukum, maupun budaya hokum. Oeh sebab itu pembentukan aturan hukum (Undang-Undang) sangat diperlukan dalam penegakan suatu tata tertib yakni *law enforcement* yang sangat diperlukan.

Dalam suatu negara yang baru merdeka, tentu saja banyak hal yang harus dibenahi termasuk pembentukan undang-undang yang akan dijadikan dasar fundamental yang mengatur dan mengikat perilaku bermasyarakat. Timor Leste adalah negara yang merdeka pada era globalisasi dan berk komunitas bagian dari internasional, oleh sebab itu perlu suatu pembangunan atau konstruksi hukum yang baik dan tidak betentangan dengan asas internasional. Masyarakat yang ada di Timor Leste bagi sejak awal masuk dan tinggal hingga keluar dari teritori nasional sangat memerlukan pengontrolan yang baik supaya tercipta keadilan dan kesejahteraan yang diperlukan baik negara maupaun masyarakat. Hukum atau peraturan

perundang-undangan yang ada harus berakar responsif hingga dapat merespon tuntutan persoalan pelanggran keimigrasian yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang.

Penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik dan kasihNya yang besar, karena hingga saat ini dilimpahkan hikmat serta rahmat untuk menimbulkan pikiran yang baik dalam penulisan karya ilmiah atau ide dalam bahasa yang dituangkan dalam penulisan.

Terimah kasih untuk kedua **orang tua, Istri dan anak** yang senantiasa mendukung dalam proses perkuliahan saya hingga dalam penulisan tesis ini. Terimah kasih penulis ucapkan juga untuk:

1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan Seluruh Civitas Akademis PPs Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Karena atas kerjasama dan pelayanan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis;
2. Dr. Tri Budiyo, SH., M.Hum., selaku Kaprodi, dosen mata kuliah dan sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah memberikan masukan literatur serta saran dalam penulisan tesis ini;
3. Umbu Rauta, SH. MH. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan ide-ide serta saran

yang sangat motivatif dalam penyelesaian penulisan tesis ini;

4. Dosen-dosen penguji; Krishna Djaya Darumurti, SH.,M.H, Titon Slamet Kurniah, SH. MH., yang bersedia menguji, mengkritisi dan memberikan saran demi penyempurnaan karya tulis ini;
5. Semua staf dosen PPs Magister Ilmu Hukum UKSW yang telah memberikan penulis berbagai Ilmu dan telah menunjukkan suasana Akademik yang penuh kebersamaan tanpa batas, yang membuat penulis percaya diri dalam menghadapi tantangan selama perkuliahan berlanjut hingga selesai;
6. Pemerintah Timor Leste khususnya Kementerian Pertahanan dan Keamanan dari Menteri Muda Keamanan melalui Institusi Kepolisian, yang telah memberikan kesempatan kepada saya selama ini, baik itu *finance* maupun dukungan secara institusional kepada penulis untuk menyelesaikan PPs Magister Ilmu Hukum di UKSW;
7. Direktur Nasional serta jajaran Struktural Keimigrasian Timor Leste yang telah memberikan kesempatan dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan Studi di PPs. Magister Ilmu Hukum sekaligus untuk melakukan penelitian yakni melakukan interview, pengambilan data serta melakukan observasi lapangan;

8. Direktur serta jajaran Struktural Instituição Nasional de Administração Publico de Timor Leste, yang selama ini mengurus dan palning tentang biaya perkulihan berjalan;
9. Mba Widya selaku sekretaris PPs. Magister Ilmu Hukum yang selama ini memberikan pelayan yang baik dalam pengurusan administrasi serta membantu persiapan dalam proses Akademik berlangsung.
10. Istri dan anakku tercinta Jena dan Nivio, Bapak dan Ibuku serta saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan dukungan moril maupun spirituil dalam menyelesaikan pendidikan di PPs. Magister Ilmu Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga.
11. Teman-teman seangkatan sebagai keluarga besar PPs. Magister Ilmu Hukum, Zazid, Rurun, Joaquen, Aquiles, Henry, Arie, Fredy Sousa, Rydo, Dian, Ayu, Yos, Hernani, Alvaro, Silveiro dan yang lain tidak saya sebutkan yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam hal share ide maupun saran dalam penulisan tesis.
12. Teman-teman kerabat kerja dari Timor Leste sepenuhnya yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk melanjutkan kuliah di PPs. Magister Ilmu Hukum guna penambahan ilmu

hukum demi pengembangan karier serta demi pembangunan hukum di masa depan;

13. Terima kasih pula kepada Bapak/Ibu, rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama penulisan tesis ini;
14. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas segala kemurahan hati Bapak/Ibu saudara sekalian.

Dalam penulisan karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan bantuan para pembaca untuk melengkapinya. Karena pada awalnya penulis sudah mempunyai motto bahwa *“You can finishing your university, but education and learning process is still continue until the last day of your life”*. Pada kesempatan ini, pertemuan para pembaca dengan tesis ini menjadi suatu temuan ilmiah bagi kaum akademik.

Salatiga, Juli 2013

**Penulis**



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR GRAFIK .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Peumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Kegunaan Penelitian .....	15
1.5 Kerangka Teori .....	15
1.6 Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>31</b>
2.1 Pembentukan Undang-undang ..	31
2.2 Negara Hukum .....	35
2.3 Sistem Hukum .....	43
2.4 Keberlakuan Hukum .....	58
2.5 Penegakan Hukum .....	62
2.6 Pelanggaran .....	71
2.7 Kajian Norma .....	75
<b>BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	<b>87</b>
3.1 Gambaran Umum Wilayah .....	87
3.2 Jenis dan Pola Penyelesaian Pelanggaran Keimigrasian .....	97
3.3 Analisis .....	133
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>159</b>
4.1 Kesimpulan .....	159
4.2 Saran .....	163
DAFTAR PUSTAKA .....	167



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 : Jumlah Staf Polisi Imigrasi .....	92



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 : Menurut Jenis Kelamin .....	92
Gambar 3.2 : Jumlah staf Polisi Imigrasi menurut Tingkat Pendidikan .....	93



## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
Grafik 3.1 : Klasifikasi Jenis Kasus Pelanggaran Keimigrasian Timor Leste .....	101
Grafik 3.2 : Jumlah Pelanggaran <i>Illegal Crossing</i> Tahun 2008-2012 .....	110
Grafik 3.3 : Jumlah <i>Illegal Stay</i> Tahun 2008-2012 .....	115
Grafik 3.4 : Tingkat Penyalahgunaan Visa Tahun 2008-2012 .....	120
Grafik 3.5 : Pemalsuan Visa Tahun 2008-2012 ..	128

